

Suparman Marzuki

Masalah Kejahatan di Perkotaan

DALAM khasanah literatur kriminologi, terdapat tiga perspektif pokok yang digunakan dalam menganalisis kejahatan yaitu :

Pertama, perspektif yang mencari sebab kejahatan pada diri individu pelaku kejahatan, dengan menganalisis aspek biologis dan psikologisnya. Perspektif ini mengembangkan asumsi-asumsi dasar mengenai perbedaan antara penjahat dengan yang bukan penjahat, dan berupaya menemukan ciri-ciri khusus pelaku kejahatan pada perspektif "koreksional" tentang kejahatan.

Kedua, perspektif yang lebih memperluas wawasan mengenai penyebab kejahatan pada kondisi-kondisi yang "menghasilkan" penjahat. Asumsi dasarnya adalah, bahwa kejahatan merupakan produk sistem sosial sehingga dikembangkan teori-teori yang memusatkan perhatian pada *struktur kesempatan yang berbeda-beda* (differential opportunity structure), kemiskinan, rasisme dan lain-lain. Kausa kriminalitas ditelusuri pula di lingkungan keluarga, kelompok pergaulan, dan lingkungan setempat, dengan asumsi bahwa kondisi

lingkungan yang *patalogis* dipandang sebagai faktor situasional timbulnya kejahatan.

Ketiga, perspektif yang melihat sifat politis dari kejahatan, dalam pengertian bahwa kejahatan adalah gejala di dalam masyarakat yang tidak terlepas dari konflik-konflik, kekuasaan-kekuasaan dan kepentingan-kepentingan, yang mencakup juga pelanggaran nilai-nilai dan norma-norma kemanusiaan dan keadilan.

Melalui perspektif ketiga ini lalu dikembangkan *paradigma* yang menggariskan bahwa golongan-golongan *dominan* dalam masyarakat yang memiliki dan mengendalikan berbagai sumberdaya sosial, ekonomi dan politik mengkriminalisasikan perilaku-prilaku yang dianggap mengancam tatanan yang ada, sehingga perumusan tentang kejahatan ditentukan oleh perubahan-perubahan struktur sosial, perkembangan kepentingan-kepentingan golongan serta peningkatan hasrat untuk melindungi golongan tersebut.

Dari ketiga perspektif analisis itu,

untuk menjelaskan fenomena kejahatan perkotaan di negara-negara berkembang, pada umumnya mengacu pada kerangka analisis perspektif kedua dengan pendekatan *struktur sosial* dan pendekatan *proses sosial*. Pendekatan pertama melihat kejahatan dalam hubungannya dengan struktur sosial atau pengorganisasian masyarakat, sedang pendekatan kedua memandang proses-proses individu menjadi penjahat sebagai hal yang pokok.

Dalam kerangka kedua pendekatan itulah tulisan ini secara teoritik mencoba mengkaji permasalahan kejahatan di perkotaan, terutama kejahatan "konvensional".

II

Gambaran umum kuantitas kejahatan di Indonesia selama kurun waktu lima tahun belakangan ini (1986-1990) memperlihatkan kecenderungan turun-naik, baik jumlah absolut, tiap jenis kejahatan maupun laju kejahatan (*crime rate*) per 10.000 penduduk. Lihat tabel I.

Kendatipun tabel tersebut tidak menggambarkan keadaan kejahatan yang sesungguhnya mengingat keterbatasan statistik kriminal, tetapi paling tidak terdapat dua kesimpulan menarik yang perlu dikemukakan.

Pertama, sungguhpun dalam dua tahun terakhir kuantitas kejahatan tampak mengalami penurunan, tapi resiko untuk menjadi korban kejahatan setiap 10.000 penduduk tetap tinggi, berkisar 10,45 orang dalam skala waktu peristiwa rata-rata 2,8 menit.

Kedua, tahun 1987 dan 1988 tampak ditandai oleh peningkatan kejahatan melampaui pertambahan penduduk. Pada tahun 1987 penduduk bertambah 2,4 persen sedang kejahatan berlipat sekitar 20,2 % tahun berikutnya penduduk bertambah 2,08 persen sementara kejahatan meningkat sekitar 6 persen. Jika saja peningkatan kejahatan dapat dijelaskan dengan pertambahan penduduk, maka perlipatan kejahatan yang melebihi

Banyaknya penduduk, peristiwa kejahatan angka kejahatan per 10.000 pdd. indeks dan skala waktu peristiwa (menit).

1986 - 1990

Tahun	Banyaknya penduduk	Jumlah kasus	Angka per 10.000 pdd	Indeks 1986 = 100	Waktu (menit)
1986	168.085.5	148.798	8,9	66,5	3,5
1987	172.224.8	186.506	11,0	83,4	2,8
1988	175.903.8	199.253	11,3	85,2	2,6
1989	177.043.0	198.697	11,0	84,9	2,6
1990	179.321.6*	176.841**	9,9	75,6	3,0

Sumber : 1986-1989 BPS/diolah kembali

* sensus 1990 ** Menko Polkam

pertambahan penduduk sungguh suatu hal yang mengkhawatirkan.

Sementara itu gambaran umum jenis-jenis kejahatan tertentu selama periode yang sama memperlihatkan kecenderungan sebagai berikut : lihat tabel II.

bongkaran rumah ketua umum DPP PDI dan Mantan Menlu Mochtar Kusumatmaja serta beberapa lainnya menunjukkan kecenderungan itu.

Yang lebih mengkhawatirkan dari *trend* curat ini, adalah disertainya kejahatan itu dengan pembunuhan dan

Jumlah jenis kejahatan tertentu 1986 - 1990

No.	Jenis Kejahatan	1986	1987	1988	1989	1990
1.	Pencurian berat	48.403	47.317	48.466	51.315	
2.	P. Aniaya berat	11.930	12.801	10.871	10.216	
3.	Pencurian keras	8.245	8.552	7.279	6.705	
4.	Curanmor	6.768	7.773	8.121	8.774	
5.	Pembunuhan	1.711	1.616	1.514	1.554	
6.	Perkosaan	1.660	1.523	1.460	1.419	

Sumber : BPS

1990 belum ada data resmi.

Dari tabel II beberapa contoh dikemukakan :

Pertama, secara kuantitatif pencurian berat selama periode 1986/1989 tetap menempati ranking atas, rata-rata 27,5 persen dari total kejahatan. Sedang aspek kualitatif terutama yang menyangkut obyek sasaran serta kecenderungan tindakan tampak mengalami pergeseran terus-menerus, seolah mengikuti irama kewaspadaan dan kesiagaan masyarakat dan Polisi.

Periode sekitar 1980-1985 obyek sasaran *curat* tidak mengalami perubahan berarti, masih diarahkan pada sembarang sasaran, terutama rumah-rumah penduduk yang kurang mempertimbangkan kemungkinan besar kecilnya hasil jarahan. Keadaan ini pada 1990 khususnya, tampak lebih diarahkan pada pemukiman-pemukiman elit penduduk perkotaan, dengan *modus operandi* yang mencirikan *organized crime*. Pem-

atau perkosaan sebagaimana beberapa kali terjadi selama tahun 1990. Lebih-lebih bila gejala tersebut sudah menjadi *cara* yang terencana dari upaya mereka menjarah harta benda korban.

Kedua, penganiayaan berat yang selama beberapa tahun ini menempati ranking kedua dengan persentase 6,37 persen dari total kejahatan sejauh ini lebih banyak disebabkan oleh gangguan emosi spontan dan dendam.

Kasus penganiayaan ini sesungguhnya sangat memprihatinkan, bukan hanya karena jumlah kasusnya begitu tinggi setiap tahun, tapi juga menunjukkan makin rendahnya penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dimana orang tak segan-segan saling aniaya antar sesamanya. Barangkali inilah salah satu dampak negatif dari percepatan proses pem-

bangunan selama ini, yang secara langsung atau tidak menumbuhkan perilaku individualisme dan materialistik, yang pada gilirannya mendegradasi nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri menjadi sosok insan kosong semangat spritual.

Ketiga, pencurian dengan kekerasan yang biasanya tampil dalam bentuk perampokan Bank dan nasabahnya, perampokan terhadap toko-toko emas atau tambak-tambak udang selama tahun 1990 yang lalu terlihat makin berani dan makin nekat. Mereka tak segan-segan melawan petugas yang berakibat 46 orang pelaku kejahatan terkena tembakan Polisi, 19 orang diantaranya meninggal. Meningkat dibanding tahun 1989 dengan angka 11 orang tertembak 4 diantaranya tewas. Di pihak Kepolisian tercatat 14 luka ringan, 7 luka berat (keterangan pers Kapolda Metro Jaya akhir 1990).

Meningkatnya keberanian dan kenekatan ini boleh jadi merupakan reaksi balik dari tindakan kekerasan aparat Kepolisian itu sendiri terutama ketakutan mereka terhadap penangkapan yang dalam kamus mereka sama dengan siksaan. Bahayanya respon kekerasan itu telah dijadikan strategi operasi, sehingga tak heran bila banyak korban kejahatan yang dianiaya atau malah dibunuh. Aspek negatif inilah yang menuntut aparat Kepolisian mengkaji kembali strategi pencegahan dan penanggulangannya.

Keempat, pencurian kendaraan bermotor (*curanmor*) yang selalu menempati urutan ke empat dalam jumlah adalah salah satu kejahatan

"konvensional" yang paling memusingkan Kepolisian, bukan hanya karena selalu meningkat dari tahun ke tahun tapi juga makin canggihnya *modus operandi*.

"Pembaharuan" teknik-teknik kejahatan curanmor ini tidak hanya pada cara membuka kunci pengaman, menghidupkan mesin, memodifikasi dan seterusnya, juga pada jaringan yang makin luas dan *solid*. Bahkan ada kecenderungan keterpaduan operasi antar daerah yang melibatkan oknum ABRI dibelakangnya. Hal inilah yang membuat curanmor terus melaju dan sulit dilacak.

Kelima, kasus pembunuhan dari segi jumlah relatif rendah dibanding jenis kejahatan lain, tapi tetap dipandang memiliki derajat seriusitas tinggi yang menimbulkan sifat *fear of crime* yang tinggi pula dalam masyarakat.

Selama tahun 1990 memang tidak terjadi pembunuhan tergolong sadis seperti pernah terjadi tahun 1989 lalu, cuma tetap menempati peringkat pertama jenis kejahatan paling menakutkan masyarakat.

Survei *Kompas* akhir tahun 1989 yang lalu menunjuk data, bahwa 400 responden berusia 17-65 tahun menyebut pembunuhan dengan cara sadis sebagai kejahatan paling menakutkan. Sama dengan hasil survei sejenis yang pernah dilakukan di Amerika Serikat, antara lain oleh Marvin Wolfgang dan Sellin di Philadelphia (1964), serta Rossi dan kawan-kawan di Baltimore Maryland (1974) yang juga menyebut pembunuhan.

Keenam, perkosaan menempati urutan paling bawah dari tabel II, tapi termasuk jenis kejahatan paling meresahkan. Selama tahun 1990 banyak terjadi perkosaan yang melibatkan usia 4-21 tahun sebagai korban dan usia 50 tahun ke atas sebagai pelaku.

Dalam banyak penelitian, ternyata 60% dari pelaku mempunyai hubungan sosial dengan korban, mulai dari hubungan keluarga dekat (seperti ayah kandung/tiri, kakek, kakak ipar dan sebagainya) sampai ke hubungan saling kenal biasa. Tak jarang perkosaan ini diakhiri dengan pembunuhan.

Sebagai tambahan data, perlu pula diketengahkan umur pelaku kejahatan yang diambil dari hasil penelitian Dr. Astrid S. Susanto, Peneliti yang membedakan umur pelaku kejahatan di kota besar dan kota kecil dengan membandingkan kelompok umur 15-24 tahun dan kelompok 25-55 tahun ditarik kesimpulan (berdasarkan angka mutlak) bahwa rata-rata dalam tahun 1980 maupun tahun 1981 tampak gejala :

Pelaku kejahatan di kota besar cenderung lebih banyak yang berumur 15-24 tahun, dibandingkan dengan kelompok umur 25-55 tahun. Sebaliknya, pelaku kejahatan di kota kecil cenderung yang berumur 24-55 tahun, dibandingkan dengan kelompok umur 15-24 tahun.

Dilihat dari angka nisbi (%) di kota besar hampir 58% kejahatan dilakukan oleh pelaku berumur 15-24 tahun sedangkan sebanyak 41,9 persen dilakukan oleh pelaku dalam kelompok

umur 25-55 tahun; sisanya dilakukan oleh kelompok umur dalam umur lainnya. Di kota kecil kejahatan oleh kelompok umur 15-24 tahun mencapai 44,9% dibandingkan dengan kelompok umur 24-55 tahun yang mencapai sekitar 55%.

Penelitian Astrid itu tidak jauh berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Marshall B Clinard yang juga menyebut kelompok umur 25 tahun ke bawah paling banyak melakukan kejahatan di perkotaan negara-negara berkembang.

Itulah gambaran umum kriminalitas di Indonesia yang 85% lebih terjadi di perkotaan, dan itu hanya salah satu indikator numerik dari realitas sosial kejahatan terutama *ordinary crime* yang ada di perkotaan. Tulisan ini selanjutnya mencoba menelusuri akar kejahatan di perkotaan itu dari sisi sosiologis.

III.

Seiring dengan laju perubahan sosial yang begitu cepat sepanjang sejarah pembangunan Indonesia ditandai pula oleh perkembangan kota-kota dengan kompleksitas fungsinya yang tidak sekedar berfungsi administratif dan komersial, tapi juga tumbuh sebagai simpul interaksi sosial yang mempengaruhi sistem nilai dan norma serta prilaku masyarakat.

Perubahan sistim nilai, norma dan prilaku itu tak terhindarkan ketika kota muncul sebagai tempat persemaian unsur-unsur sistim budaya "moderen", sarat oleh simbol modernitas serta segenap nilai disekitarnya, padat oleh kemajuan-kemajuan tekno-

ekonomis, penuh dengan fasilitas dan pelayanan dan industri jasa, yang pada gilirannya merangsang peningkatan kebutuhan warganya di satu pihak serta merangsang warga pedesaan untuk pindah ke kota yang telah kehilangan daya tarik karena makin terkikisnya sumber daya pedesaan itu sendiri.

Gambaran pait pedesaan selama tidak kurang sepuluh tahun ('75-83) terutama pedesaan Jawa memang tak terpungkiri karena dalam tempo tersebut jumlah petani pemilik lahan kurang dari 0,5 persen dari total lahan pertanian. Sedang petani dengan lebih dari 5 ha, yakni 2,3 % menguasai 18,4 persen luas tanah pertanian. Ketimpangan serupa terjadi juga dalam pemilikan, penguasaan dan pengendalian sumberdaya yang lain. Belum lagi intervensi "orang kota berduit" yang membeli secara besar-besaran tanah pertanian untuk menjadi "petani berdasi", makin membuat alam pedesaan kian tak "aman" untuk ditinggali.

Sehingga dengan demikian, gemuruh kota oleh derap pembangunan dan kilauan kemakmurnannya, seolah menggapai harapan petani dan kaum murba pedesaan di satu pihak, serta kenestapaan hidup di desa di pihak lain, secara bersama-sama berperan sebagai *pull* dan *push* arus urbanisasi hingga kini. Akibatnya kita melihat suatu *stereotype* kota besar, yaitu pengangguran, berdirinya perumahan-perumahan liar dan seterusnya, sebagai dampak langsung dari keadaan kota yang menanggung beban lebih (*over urbanization*).

Impian tentang kota yang seolah menjanjikan masa depan cerah itu pada kenyataannya bukan untuk mereka, semua itu ilusi, atau meminjam istilah Y. Friedman sebagai khayalan belaka yang hanya akan mengantarkan mereka menjadi komunitas nestapa baru, menjadi semacam "lumpenproletariat", yang menghuni daerah "slums".

Akibat itu tidak diperkirakan, karena sebagian besar kaum migran ini tidak dibekali keterampilan kerja sektor kota, bahkan menurut beberapa penelitian khususnya di Jakarta, 69% kaum migran ini berpendidikan SD, dengan tujuan terbesar mencari pekerjaan. Ketidaksiapan kota-kota menampung mereka (tidak tersedianya pekerjaan yang "layak", hilangnya "primary social control" serta kebingungan norma dalam "urban way of life") menurut Mardjono Reksodiputro akan mendorong para pendatang ini memilih cara-cara yang tidak sah ("illegitimate means") dalam kehidupan mereka di kota.

Dari sisi lain menurut Hans-Dieter Evers berkaitan pula dengan keterbelakangan kota itu sendiri. Karena meskipun prasarana kota telah ditingkatkan dan pendapatan pada umumnya sudah bertambah, tapi angka statistik pemerintah dan data-data survei lain justru menunjukkan jurang antara golongan kaya dan miskin telah melebar selama 15 tahun terakhir. Tampaknya ada penduduk inti yang relatif stabil di dalam kelompok masyarakat yang pendapatannya lebih tinggi di kalangan penduduk yang berpendapatan rendah. Inti ini

dikelilingi oleh 'masa apung' dari orang-orang yang sangat mobil sifatnya. Mereka boleh jadi para pendatang yang baru saja pindah ke kota, atau bahkan pendatang musiman yang terus-menerus berpindah di berbagai daerah pemukiman.

Efek psikologis dari kondisi kota yang demikian itu di satu pihak dan kondisi kaum urban itu sendiri di lain pihak, adalah tumbuhnya frustrasi kumulatif yang secara potensial dapat mencetuskan kejahatan yang menurut Erich Fromm merupakan wujud dari *kekerasan reaktif* dan *kekerasan kompensatoris*, yang menguap dari endapan rasa iri dan cemburu akibat tersisihnya mereka dari dinamika sosial ekonomi dan kultural perkotaan.

IV

Beranjak dari pemikiran di atas, maka beberapa hal yang patut dikhawatirkan terutama dalam kaitannya dengan masa depan bangsa ini yang akan memasuki tahap baru pembangunannya, adalah :

Pertama. Melihat arus urbanisasi yang hampir tak terkendali, maka perlu mengantisipasi kecemasan Bank Dunia akan kejadian yang bakal menimpa kota-kota metropolitan menjelang tahun 2000 yang diperkirakan tidak akan muncul kota-kota metropolitan yang ditandai oleh kepadatan penduduk, fasilitas yang lengkap (tempat tinggal, transportasi, sarana kesehatan dan sebagainya), cara hidup yang maju dengan komputerisasi, highways, komunikasi modern, dll. melainkan tumbuh kota-kota *miseropolitan* dengan jumlah

penduduk yang terlampau cepat membengkak, tingkat heterogenitas dan anomitas yang tinggi, persaingan, orientasi materialistis, dll.

Kedua. Terus berlangsungnya ketidakseimbangan antara konsentrasi modernisasi dan kekuatan-kekuatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan keterbelakangan populasi pedesaan dan ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja serta ketidakseimbangan antara tuntutan-tuntutan bawaan untuk menciptakan sistim ekonomi dengan perkembangan keterampilan (dari Marshal B. Clinard).

Ketiga. Jika saja terdapat korelasi positif antara usia pelaku kejahatan perkotaan (15-24) tahun dengan arus urbanisasi yang paling banyak dari golongan umur yang sama, maka kekhawatiran itu patut diantisipasi. Lebih-lebih bila dihubungkan dengan harapan terhadap NRR (Net Reproduction Rate) yang baru mencapai 1,00 dalam tahun 2001 (berarti terdapat "non growing population"), maka dapat diproyeksikan sebagai berikut :

Perbandingan antara kelompok remaja dengan kelompok dewasa, maka kelompok remaja tetap tinggi dalam kelompok umur 10-64 (1971:45 persen; 1981:49%; 1991:46%; dan 2001:42%), malahan dalam tahun 1981 hampir setengah penduduk 10-64 tahun adalah remaja berumur 10-24 tahun.

Persentase penambahan dalam kelompok remaja pada tahun 1981

adalah 42%, tetapi kemudian menurun dengan cepat (1991:21% dan 2001:2%). Sebaliknya kelompok dewasa mulai dengan persentasi pertambahan 22% dalam tahun 1981, kemudian meningkat lagi (1991:34% dan 2001:32%). Proyeksi ini dibuat dengan asumsi bahwa program Keluarga Berencana (KB) Indonesia memang berhasil mencapai "non growing population" dalam tahun 2001, (diikuti dari Boy Mardjono, Parados dalam Kriminologi, hal. 101).

Dengan demikian, kenaikan kriminalitas di perkotaan secara hepotetis telah dapat diperkirakan dan akan tetap menjadi problem serius dimasa depan.

Alternatif pencegahan berdasarkan kerangka pemikiran di atas, tentu tidak memadai kalau hanya mencegah arus urbanisasi berlebihan atau hanya mempersiapkan "organized slums"

serta memperketat saran pengendalian sosial dalam skala lokal. Penanganan masalah kriminalitas perkotaan tersebut harus dituangkan secara terpadu kedalam suatu perencanaan social policy dalam skala nasional.

Bahan Rujukan

1. Dr.J.E. Sahetapy,; Boy Mardjono (Parados dalam Kriminologi, 1982 Cv. Rajawali).
2. Mulyana W.Kusumah (Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi, Alumni; 1981).
3. *Economica UI* Vol XI No.1 tahun 1983
4. Mulyana W.Kusumah (Kejahatan dan Penyimpangan, Suatu Perspektif Kriminologi, Alumni; 1988).
5. Statistik Kriminal Indonesia, BPS